

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah suatu kehormatan yang membawa berbagai manfaat dan tantangan bagi negara penyelenggara. Sebagai salah satu acara olahraga terbesar dan paling bergengsi di dunia, Piala Dunia menarik jutaan penonton global dan ribuan pengunjung internasional, memberikan peluang unik bagi negara tuan rumah untuk menampilkan dirinya di panggung dunia. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan ekonomi. Persiapan dan pelaksanaan turnamen ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur seperti stadion, hotel, transportasi, dan fasilitas umum. Meskipun biaya yang dikeluarkan signifikan, investasi ini dapat menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang yang positif, termasuk peningkatan pariwisata serta penciptaan lapangan kerja baru (Allmers & Maennig, 2009).

Selain itu, Piala Dunia memberikan kesempatan emas bagi negara tuan rumah untuk meningkatkan citra internasionalnya. Melalui liputan media global, negara tersebut dapat menampilkan budaya, keindahan alam, dan kemampuan organisatorisnya. Peningkatan citra ini dapat berdampak positif pada hubungan diplomatik dan menarik investasi asing di masa mendatang. Beberapa negara menggunakan kesempatan ini untuk melakukan diplomasi budaya, memperkenalkan warisan budaya mereka kepada dunia, dan mempromosikan nilai-nilai positif (Horne & Manzenreiter, 2006).

Sebagai bagian dari persiapan, banyak negara melakukan pembenahan besar-besaran terhadap infrastruktur mereka. Pembaruan dan pembangunan jalan, bandara, fasilitas olahraga, dan sistem transportasi publik memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduk setempat. Sebagai contoh, Brasil yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014, melakukan perbaikan besar-besaran pada sistem transportasi dan fasilitas umum lainnya yang terus memberikan manfaat hingga saat ini (Baade & Matheson, 2016).

Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara kandidat. Negara tuan rumah harus memiliki stadion yang memenuhi standar FIFA, termasuk kapasitas penonton yang besar, fasilitas modern, dan keamanan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti hotel, transportasi, dan fasilitas medis harus memadai. Negara tersebut juga harus mampu menjamin keamanan bagi para pemain, ofisial, dan penonton selama berlangsungnya turnamen. Dukungan penuh dari pemerintah setempat dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan komitmen politik sangat penting. Negara kandidat juga harus memiliki rencana pengelolaan yang baik untuk semua aspek turnamen, termasuk logistik, penyelenggaraan pertandingan, dan promosi. Pengalaman dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional besar sebelumnya akan menjadi nilai tambah (Allmers & Maennig, 2009). Beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia meliputi Uruguay (1930), Italia (1934), Prancis (1938), Brasil (1950), Swiss (1954), Swedia (1958), Chili (1962), Inggris (1966), Meksiko (1970), Jerman Barat (1974), Argentina (1978), Spanyol (1982), Meksiko (1986), Italia (1990), Amerika Serikat (1994), Prancis (1998), Korea Selatan dan Jepang

(2002), Jerman (2006), Afrika Selatan (2010), Brasil (2014), Rusia (2018), dan Qatar (2022). Negara-negara yang sering kali berebut untuk menjadi tuan rumah termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Asia serta Afrika yang mulai aktif mengajukan tawaran mereka (Baade & Matheson, 2016).

Menjadi tuan rumah Piala Dunia membawa beberapa urgensi dan manfaat penting. Manfaat ekonomi termasuk peningkatan ekonomi melalui pariwisata, investasi infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Piala Dunia memberikan kesempatan untuk meningkatkan citra internasional negara, mempromosikan budaya, dan menarik perhatian global. Turnamen ini juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk memperbaiki hubungan internasional dan memperkuat posisi geopolitik negara. Menjadi tuan rumah juga mendorong pengembangan olahraga lokal dengan peningkatan fasilitas dan program olahraga, serta menumbuhkan rasa bangga dan solidaritas nasional di antara warga negara (Preuss, 2004).

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2021 setelah berhasil mengalahkan Brasil dan Peru dalam proses pemilihan. Keputusan tersebut diumumkan selama pertemuan Dewan FIFA di Shanghai, China, pada Oktober 2019. (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Dukungan signifikan dari pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo yang sepenuhnya berkomitmen untuk memfasilitasi acara tersebut, memperkuat tawaran Indonesia. Ini termasuk rencana untuk perbaikan infrastruktur dan persiapan stadion di berbagai kota di Indonesia, menunjukkan kesiapan dan antusiasme negara tersebut untuk menjadi tuan rumah turnamen. Awalnya, persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021

melibatkan beberapa negara, dengan tawaran dari Brasil, Peru, Bahrain, Arab Saudi, dan UEA, di antara lainnya. Namun, pada tahap akhir, Indonesia muncul sebagai kandidat yang diunggulkan karena presentasi detail dan diterima dengan baik kepada FIFA. Kemenangan tawaran ini merupakan pencapaian penting bagi Indonesia, menyoroti kemampuan dan aspirasi negara tersebut di arena olahraga global (Indonesia.go, 2023).

Menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA dianggap sebagai kesempatan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan profil internasionalnya dan mempromosikan potensi negara dalam menyelenggarakan acara olahraga berskala besar. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sepak bola lokal, meningkatkan pariwisata, dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan paparan global. Pada Juni 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengajukan permohonan tambahan dana sebesar Rp3 triliun dari pemerintah untuk pengembangan olahraga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp500 miliar dialokasikan khusus untuk persiapan Piala Dunia U-20 FIFA 2023. Permohonan ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta fasilitas olahraga menjelang turnamen internasional (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2022).

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi dengan menyuntikkan dana sebesar Rp314 miliar untuk renovasi stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia U-20. Pada bulan berikutnya, tambahan dana sebesar Rp175 miliar juga disalurkan untuk keperluan yang sama. Dengan total suntikan dana sebesar Rp489 miliar dari Kementerian PUPR,

anggaran keseluruhan untuk renovasi stadion mencapai angka signifikan. Keenam stadion yang akan direnovasi telah diumumkan PSSI pada 2020 lalu saat Piala Dunia U-20 masih direncanakan berlangsung pada 2021, antara lain Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Manahan, dan Stadion Kapten I Wayan Dipta. Jika seluruh dana tersebut direalisasikan dan digunakan sesuai rencana, total belanja modal untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 dapat mencapai Rp1,4 triliun. Angka ini mencerminkan investasi besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia memenuhi standar internasional dan dapat menyelenggarakan turnamen dengan sukses (Kementerian PUPR, 2022).

Namun, Indonesia dihadapkan pada polemik publik yang signifikan terkait rencana keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20, yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia. Pergolakan ini muncul dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, aktivis, dan sejumlah tokoh politik, yang secara tegas menolak kehadiran tim nasional Israel di tanah air. Penolakan ini dilandasi oleh sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sebuah posisi yang telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama (Kompas.com, 2023).

Menanggapi keputusan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembatalan ini merupakan keputusan FIFA, bukan keinginan pemerintah Indonesia. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa meskipun Indonesia menghormati hak partisipasi semua negara dalam ajang olahraga internasional, pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang mendukung

kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini menunjukkan kompleksitas dilema diplomatik yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu menyeimbangkan antara komitmen moral terhadap Palestina dan tanggung jawab sebagai tuan rumah acara global (Setkab.go.id, 2023).

Ketidaksetujuan terhadap Israel muncul dari beberapa sosok berpengaruh di Indonesia, termasuk Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia dan karena kebijakan Israel yang dianggap sebagai bentuk penjajahan terhadap Palestina (Kompas.com, 2023)

Gelombang protes ini kemudian memuncak pada pengambilan keputusan oleh FIFA untuk membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20. Pada Maret 2023, FIFA secara resmi mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak dan memicu diskusi luas tentang dampaknya terhadap reputasi Indonesia di dunia internasional. Pada 29 Maret 2023, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi mengumumkan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Keputusan ini diambil setelah terjadi kegaduhan politik dan sosial yang signifikan di Indonesia, khususnya terkait penolakan terhadap partisipasi Timnas Israel. Sebelum keputusan pembatalan diumumkan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berakar dari ketidaksetujuan beberapa tokoh dan pejabat lokal terhadap kehadiran Israel di turnamen tersebut.

Situasi semakin memanas ketika FIFA membatalkan rencana untuk mengadakan drawing Piala Dunia U-20 yang semestinya berlangsung di Bali pada

31 Maret 2023. FIFA, di bawah kepemimpinan Presiden Gianni Infantino, memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, *fair play*, dan anti-diskriminasi dalam pelaksanaan turnamen. Sebagai badan pengatur sepak bola internasional, FIFA mengharapkan jaminan keamanan yang memadai untuk semua negara peserta, termasuk Israel. Ketidakmampuan Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan yang memadai dan meyakinkan FIFA tentang komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor utama dalam keputusan pembatalan.

Gelombang protes dari masyarakat sipil di Indonesia terkait keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 2023 menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Masyarakat sipil, yang memiliki keterikatan historis dan emosional dengan perjuangan Palestina, menggerakkan berbagai aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran Israel. Di sisi lain, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan FIFA yang menuntut non-diskriminasi terhadap semua peserta. Ketegangan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil mempengaruhi dinamika kebijakan dalam negeri, yang harus berhadapan dengan komitmen internasional. Bab selanjutnya akan membahas alasan di balik munculnya gelombang protes dari masyarakat sipil terhadap keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yang timbul adalah mengapa adanya gelombang protes publik Indonesia terhadap keikutsertaan Timnas Israel pada FIFA U-20 Piala Dunia 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam keanggotaan dalam persepakbolaan dunia, khususnya di organisasi FIFA. Selain itu, juga menjelaskan dinamika terpilihnya dan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan kemunculan gelombang protes dari publik Indonesia terhadap keikutsertaan Timnas Israel FIFA U-20 Piala Dunia 2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini bermanfaat secara akademik terutama bagi Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dapat dijadikan bahan literatur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan struktur peluang politik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara khusus untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan tentang perhelatan persepakbolaan yang menyangkut struktur peluang politik Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

1.5.1 Kajian Literatur

Penelitian Spencer Harris dan Mathew Dowling dalam buku *The Influence of Power and Politics in Sport* (2020) menggali lebih dalam tentang keterlibatan kekuasaan politik dalam olahraga, dengan fokus utama pada Skandal Doping Rusia. Skandal ini merupakan salah satu skandal olahraga terbesar yang melibatkan pemerintah Rusia, badan keamanan negara FSB, dan RUSADA, serta organisasi internasional seperti World Anti-Doping Agency (WADA), Komite Olimpiade Internasional (IOC), dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Penelitian ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dapat memanipulasi dan mengendalikan olahraga melalui berbagai tindak pidana seperti kolusi, korupsi, dan ancaman yang berujung pada kematian, serta bagaimana skandal ini mencerminkan hubungan yang kompleks antara olahraga dan politik di tingkat internasional. Dengan pendekatan teori Realisme dan International Governance, penelitian ini menyoroti pentingnya kekuasaan dalam politik internasional dan bagaimana lembaga-lembaga internasional terlibat dalam pengaturan aturan olahraga.

Sementara itu, penelitian Andreia Soares e Castro dalam artikel *The 2018 FIFA World Cup: The Gains and Constraints of Russia's Soft Power of Attraction*

Through Football and Sports (2018) mengeksplorasi bagaimana Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia dimanfaatkan oleh pemerintah Rusia untuk memperbaiki citra internasional mereka di tengah sanksi dan ketegangan politik global. Rusia menggunakan turnamen ini sebagai alat diplomasi untuk menampilkan citra positif dan stabilitas, serta untuk meningkatkan hubungan internasional dan mempengaruhi persepsi global terhadap negara tersebut. Artikel ini memperlihatkan bagaimana olahraga, khususnya Piala Dunia, dapat berfungsi sebagai instrumen soft power dan diplomasi publik, di mana daya tarik budaya dan nilai-nilai digunakan untuk membentuk persepsi global.

Dalam jurnal *The Political Impact of the 1980 Moscow Olympics Boycott* (2022), Jonathan White menganalisis dampak boikot Olimpiade Moskow 1980 oleh negara-negara Barat sebagai respons terhadap invasi Soviet ke Afghanistan. Boikot ini tidak hanya mempengaruhi atlet yang kehilangan kesempatan untuk bersaing, tetapi juga berdampak signifikan pada hubungan internasional dan ekonomi global. Negara-negara yang berpartisipasi dalam boikot memperkuat posisi mereka terhadap Soviet, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan luar negeri mereka dalam konteks Perang Dingin. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Cold War Politics* dan *International Solidarity* untuk menjelaskan bagaimana boikot tersebut merupakan strategi politik kolektif dalam menyampaikan pesan kepada Uni Soviet.

Dhênis Rosina dalam jurnalnya *Sports as a Tool for Political Protest: The Case of the 1968 Mexico City Olympics* (2017) membahas bagaimana atlet Afrika-Amerika memanfaatkan podium Olimpiade 1968 untuk memprotes ketidakadilan

rasial di Amerika Serikat. Protes ini berdampak pada persepsi internasional mengenai hak asasi manusia dan ketidakadilan rasial, serta memunculkan tantangan bagi pemerintah Meksiko dalam mengelola acara tersebut. Artikel ini menyoroti peran olahraga sebagai platform untuk ekspresi politik dan sosial, menggunakan teori Transnational Advocacy Networks dan Constructivism untuk memahami bagaimana identitas dan nilai-nilai mempengaruhi aksi politik di panggung internasional.

Shuiseng Xu dan Hanzhi Dai dalam artikel *The Influence of Political Regimes on National Sports Policies: A Comparative Study of China and the USA* (2022) membandingkan kebijakan olahraga di Tiongkok dan Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana rezim politik mempengaruhi pendanaan dan promosi olahraga. Di Tiongkok, olahraga elit sering digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan nasional, sementara di Amerika Serikat, pendekatannya lebih terdesentralisasi dengan fokus pada pengembangan olahraga di tingkat individu dan komunitas. Penelitian ini menunjukkan perbedaan prioritas dan dukungan pemerintah terhadap olahraga, serta bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat propaganda politik dan proyeksi kekuatan.

Penelitian Cristiana Lucretia Pop dalam jurnal *Olympic Games in Time of Cold War* (2017) mengeksplorasi berbagai boikot Olimpiade selama era Perang Dingin, termasuk boikot Olimpiade Moskwa 1980 dan Los Angeles 1984. Boikot ini mencerminkan ketegangan politik global dan dampaknya terhadap atlet serta hubungan internasional. Jurnal ini menunjukkan bahwa boikot Olimpiade tidak hanya mempengaruhi acara olahraga itu sendiri, tetapi juga memperburuk

ketegangan geopolitik yang sudah ada selama periode Perang Dingin, menggunakan konsep Geopolitics dan Mutual Assured Destruction (MAD) sebagai kerangka analisis.

Artikel *Sports Diplomacy and National Interests: The Case of the 2008 Beijing Olympics* membahas bagaimana Olimpiade Beijing 2008 digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan citra positif negara tersebut di mata dunia. Olimpiade ini menjadi bagian dari strategi diplomasi Tiongkok untuk mengubah persepsi global tentang negara mereka, menunjukkan kemajuan dan stabilitas politik, serta meredam kritik internasional terhadap kebijakan dalam negeri seperti pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan konsep *Nation Branding* dan *Soft Power* untuk menjelaskan bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk mempengaruhi persepsi global.

Terakhir, jurnal *The Intersection of Sports and Politics: The Case of the 1966 World Cup and National Pride in England* mengeksplorasi bagaimana kemenangan Inggris di Piala Dunia 1966 digunakan untuk meningkatkan rasa kebanggaan nasional dan menyatukan masyarakat Inggris pada masa-masa politik yang penuh ketegangan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kemenangan olahraga dapat memperkuat identitas nasional dan mengalihkan perhatian dari isu-isu politik domestik, menggunakan teori *Nationalism* dan *Cultural Diplomacy* untuk memahami dampak kemenangan olahraga pada politik domestik dan identitas nasional.

Penelitian ini menambah dimensi baru dalam studi mengenai hubungan antara olahraga dan politik, dengan fokus pada kasus gelombang protes masyarakat

sipil Indonesia terhadap keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas olahraga sebagai alat diplomasi atau propaganda, penelitian ini menyoroti bagaimana tekanan politik domestik yang dipicu oleh protes masyarakat sipil mampu memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri Indonesia.

1.5.2 *Political Opportunity Structure*

Konsep Political Opportunity Structure (POS) atau Struktur Peluang Politik pertama kali diperkenalkan oleh Peter Eisinger (1973), yang menjelaskan bahwa peluang politik bagi gerakan sosial terbuka ketika terdapat ketidakstabilan dalam sistem politik, seperti perpecahan institusi atau persaingan di kalangan elit. POS merujuk pada kondisi eksternal yang memengaruhi kemampuan gerakan sosial atau kelompok kepentingan dalam memobilisasi sumber daya dan mempengaruhi kebijakan publik. Sidney Tarrow (1998) mengembangkan lebih lanjut konsep ini dengan menekankan bahwa POS terdiri dari elemen-elemen seperti distribusi kekuasaan politik, aliansi elit, dan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Tarrow menegaskan bahwa gerakan sosial lebih mungkin berhasil ketika ada perubahan dalam struktur kekuasaan, aliansi antara kelompok elit yang lemah, atau akses yang lebih luas terhadap proses pengambilan keputusan politik.

Doug McAdam (1996) menambahkan dimensi lain pada POS dengan menyatakan bahwa bukan hanya institusi politik formal yang berperan, tetapi juga kekuatan sosial non-pemerintah seperti media, kelompok kepentingan, dan opini publik yang dapat memengaruhi peluang keberhasilan gerakan sosial. Elemen-

elemen utama dari POS yang sering dibahas oleh para ahli meliputi akses terhadap elit politik, ketidakstabilan dalam koalisi politik, keterbukaan sistem politik, serta adanya aliansi dengan kelompok elit. Akses terhadap elit politik sangat penting, karena kelompok yang memiliki akses ini lebih mampu memengaruhi kebijakan. Ketidakstabilan atau perpecahan dalam koalisi politik juga menciptakan peluang bagi kelompok sosial untuk memperkuat posisi mereka dalam dinamika politik. Menurut Kriesi et al. (1995), keterbukaan sistem politik juga menentukan peluang gerakan sosial. Sistem politik yang lebih terbuka memungkinkan kelompok sosial untuk mengadvokasi kepentingan mereka dengan lebih mudah, sementara sistem yang lebih tertutup cenderung membatasi ruang gerak kelompok tersebut.

Selain itu, McAdam (1996) berpendapat bahwa aliansi dengan elit, seperti politisi, media, atau kelompok bisnis, dapat memperkuat legitimasi dan pengaruh gerakan sosial. Dalam konteks gerakan sosial, POS sangat memengaruhi tingkat mobilisasi dan keberhasilan gerakan dalam mencapai perubahan kebijakan. Tilly (1978) berargumen bahwa mobilisasi gerakan sosial dipengaruhi oleh peluang politik yang tersedia, di mana gerakan sosial lebih aktif dalam kondisi politik yang lebih terbuka dan cenderung menghadapi represi dalam kondisi yang tertutup. Gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat merupakan contoh di mana perubahan dalam struktur peluang politik memungkinkan keberhasilan advokasi dan perubahan kebijakan. Pada akhirnya, POS tidak hanya mempengaruhi dinamika eksternal dari gerakan sosial, tetapi juga dinamika internal. Gerakan sosial yang beroperasi dalam konteks peluang politik yang tertutup cenderung lebih radikal dan

terfragmentasi, sedangkan dalam konteks yang lebih terbuka, gerakan ini lebih kooperatif dan moderat (Kriesi et al., 1995).

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 *Political Opportunity Structure*

Political Opportunity Structure (POS), menurut Sidney Tarrow (1998), adalah serangkaian kesempatan, kendala, dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh gerakan sosial dan aktor politik lainnya yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memobilisasi sumber daya dan mencapai tujuan politik. Tarrow menjelaskan bahwa peluang politik terdiri dari perubahan dalam distribusi kekuasaan politik, pembentukan atau perpecahan aliansi di antara elit, serta akses terhadap institusi politik. Peluang politik ini juga mencakup momen-momen di mana perubahan politik atau kelemahan dalam struktur kekuasaan memungkinkan gerakan sosial untuk muncul dan memperkuat posisi mereka. Struktur peluang politik tidak hanya dibentuk oleh keadaan politik formal seperti lembaga negara atau partai politik, tetapi juga oleh perubahan dalam opini publik, keterbukaan media, dan dukungan dari kelompok elit.

Dalam konsep ini, gerakan sosial dan aktor politik dipengaruhi oleh bagaimana sistem politik terbuka atau tertutup terhadap tuntutan mereka. Ketika sistem politik lebih terbuka, kelompok-kelompok sosial memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan atau mengakses kekuasaan. Sebaliknya, ketika sistem politik lebih tertutup atau represif, peluang tersebut menjadi terbatas, dan gerakan sosial harus mencari cara-cara lain untuk mengekspresikan

tuntutannya. POS, dengan demikian, menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dalam mencapai perubahan politik atau sosial yang diinginkan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 *Political Opportunity Structure*

Untuk mengoperasionalkan konsep Political Opportunity Structure (POS) dalam kasus gelombang protes publik mengenai keterlibatan Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2023 di Indonesia, kita dapat memeriksa beberapa elemen kunci. Pertama, perubahan dalam distribusi kekuasaan politik memainkan peran penting. Protes ini muncul saat adanya ketidakpastian dan perubahan dalam struktur kekuasaan politik Indonesia, dimana pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai pihak domestik dan internasional terkait isu hak asasi manusia dan hubungan internasional. Kondisi ini menciptakan peluang bagi kelompok protes untuk memobilisasi dukungan publik. Kedua, aliansi dan perpecahan di kalangan elit politik turut mempengaruhi dinamika protes. Beberapa elit politik dan kelompok masyarakat mendukung protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sementara yang lain menilai partisipasi Israel sebagai penting untuk promosi olahraga dan hubungan internasional, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok protes.

Ketiga, akses terhadap institusi politik, seperti parlemen dan kementerian olahraga, juga krusial. Kelompok protes menggunakan saluran ini, melalui petisi, demonstrasi, dan lobi politik, untuk menyampaikan tuntutan mereka. Keterbukaan

sistem politik yang memungkinkan diskusi terbuka mengenai isu-isu sensitif memberikan peluang bagi protes untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Keempat, keterbukaan sistem politik Indonesia dan peran media dalam menyebarluaskan isu protes sangat penting. Media massa dan sosial berperan dalam mempengaruhi opini publik dan memperbesar jangkauan protes. Terakhir, reaksi pemerintah terhadap protes, termasuk ancaman dan kendala seperti risiko kerusuhan sosial dan tekanan internasional, membentuk struktur peluang politik. Respons pemerintah terhadap tuntutan protes—apakah mereka mengakomodasi tuntutan atau tetap pada keputusan awal—menunjukkan bagaimana POS mempengaruhi hasil akhir gerakan sosial ini.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa gelombang protes masyarakat sipil di Indonesia terhadap keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 2023 menunjukkan bagaimana tekanan domestik dapat mempengaruhi keputusan dalam acara olahraga internasional. Protes ini menggarisbawahi keterikatan emosional masyarakat Indonesia terhadap isu-isu global, seperti konflik Israel-Palestina, yang berakar pada solidaritas sejarah dan keagamaan. Dalam konteks tersebut, muncul dilema bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk mematuhi aturan internasional, namun tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran masyarakat sipil dalam membentuk sikap Indonesia terhadap partisipasi dalam ajang olahraga internasional, memperlihatkan interaksi antara dinamika domestik dan komitmen global.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sementara itu, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *process-tracing* yang merupakan proses untuk melacak suatu sebab-akibat dari masalah dimana keberadaan variabel intervening memegang peranan kunci (Rosyidin, 2019).

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanasi karena peneliti ingin bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari sikap protes publik Indonesia terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam FIFA Piala Dunia U-20 2023.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat melibatkan berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan topik pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia FIFA U-20 2023. Berikut beberapa subjek penelitian yang relevan adalah publik Indonesia.

1.9.3 Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Data sekunder mencakup informasi yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi, serta gambar-gambar yang relevan untuk mendukung dan memperkaya analisis penelitian.

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diakses dari sumber yang telah ada sebelumnya. Untuk penelitian ini, sumber sekunder meliputi buku referensi, artikel jurnal, serta laporan berita sebelumnya dan publikasi dari media terpercaya yang mendukung proses analisis.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *desk research*. Di mana nantinya peneliti tidak perlu untuk langsung kelapangan mengumpulkan data yang terjadi dalam studi kasus ini. Peneliti menggunakan *library research* dan *internet research*. Teknik ini adalah mencari data berupa penelitian terdahulu yang berada di perpustakaan kemudian juga jurnal-jurnal yang sudah terbit. Kemudian dalam *internet research* peneliti menggunakan media internet untuk mendapatkan data-data berupa jurnal-jurnal, artikel, berita, maupun pernyataan resmi yang berupa kata-kata yang dapat dijadikan data nantinya melalui media internet. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan maka penelitian ini dapat membandingkan dan menelaah sumber yang sudah teruji validitasnya secara komprehensif.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik kongruen. Penggunaan teknik kongruen berupaya menjelaskan hubungan kausalitas atau

sebab-akibat. Hal ini memungkinkan penulis untuk memilah data sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan.

1.9.7 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang relevan dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk mendukung analisis. Sumber data sekunder tersebut mencakup buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, laporan resmi, dan berbagai media terpercaya yang dapat dipastikan keabsahannya. Dengan menggunakan data yang memiliki kualitas empiris dan teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2023.